

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF MELALUI TRANFORMASI MANAJEMEN SEKOLAH DI SMA NEGERI 3 SANGGAU

Fatmawati\*, Siti Khotimah, Usman Radiana

Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Tanjungpura Indonesia

\*Corresponding author email: [fatmawati.bendra@gmail.com](mailto:fatmawati.bendra@gmail.com)

### Article History

Received: 08 October 2024

Revised: 29 October 2024

Published: 07 November 2024

### ABSTRACT

*The principle of inclusive education policy is to integrate students with special needs in the general education environment, This research aims to decrypt the implementation of inclusive education policy through school management transformation at SMA Negeri 3 Sanggau. The school management component studied focuses on student management, curriculum and learning process. The type of research is qualitative descriptive. Interviews, observations, and documentation activities were carried out to collect data. Data sources of principals, educators and students. Data analysis uses Milles and Huberman's interactive model. Based on the results of the research, student management transformation consists of several stages, namely preparation, identification and assessment at the time of admission of new students. Then curriculum management transformation involves the development of the use of an independent curriculum that is adjusted to the inclusive adaptive curriculum of the duplication model. Furthermore, the transformation of learning process management at SMA Negeri 3 Sanggau includes 1) the preparation of learning tools including analysis of learning outcomes, learning objectives, learning goal flow, lesson plans or teaching modules, 2) the implementation of the process of teaching and learning activities in grade 3) assessment. Conclusion The implementation of the inclusive education policy has been pursued with the transformation of school management, but it still needs support from all parties so that SMA Negeri 3 can carry out inclusive education more optimally. Advice for school principals is expected to strive to establish collaboration and communication with related parties and teachers are willing to update knowledge related to inclusive education.*

**Keywords:** Implementation, Inclusive Education, School Management

Copyright © 2024, The Author(s).

**How to cite:** Fatmawati, Khotimah S. & Radiana, U. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF MELALUI TRANFORMASI MANAJEMEN SEKOLAH DI SMA NEGERI 3 SANGGAU. NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan, 5(4), 1768–1776. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i4.3478>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## LATAR BELAKANG

Pemerintah mendirikan lembaga pendidikan umum dengan harapan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semua orang berhak memperoleh pendidikan umum tanpa adanya diskriminasi. Pemberian kesamaan hak tanpa diskriminasi merupakan bentuk pemberian pendidikan yang setara meskipun kepada anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan saat berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain (Kustawan, 2013). Sejalan dengan pendapat (Vađurová & Pančocha, 2023) yang menyatakan bahwa konsep sekolah umum yang memfasilitasi pelayanan pembelajaran bagi semua anak usia sekolah disabilitas dan yang tidak disabilitas dikenal dengan istilah pendidikan inklusif. Pemerintah menyadari pentingnya pendidikan inklusif sehingga muncullah kebijakan yang mendukung implementasinya. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 32 ayat (1) berbunyi “setiap warga berhak mendapatkan pendidikan “ dan ditegaskan juga dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) tertuang pernyataan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Selain itu, Kemendikbudristek juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,

dan Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, konsekuensi dari undang-undang tersebut, negara wajib melaksanakan pendidikan untuk semua dalam rangka mencerdaskan anak bangsa secara merata dan berkeadilan. Demi menggapai pendidikan yang adil, perlu ada cara yang strategis yakni melalui sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi yang terorganisir dan berpihak pada peserta didik.

Pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana semua individu dapat belajar bersama, saling mendukung, dan mencapai potensi maksimal mereka (Sakinah & Andry, 2024). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif merupakan pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara dan layak bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas (Julia et al., 2024). Menurut Sudarto (2017), prinsip dasar dari kebijakan pendidikan inklusif adalah mengintegrasikan para peserta didik dengan kebutuhan khusus ke dalam lingkungan pendidikan umum, sehingga mereka dapat belajar bersama dengan teman sebaya mereka yang tidak memiliki disabilitas. Perkembangan dan perubahan terkini dalam sistem pendidikan di Indonesia semakin menegaskan perlunya pengintegrasian siswa berkebutuhan khusus ke dalam lingkungan pendidikan yang umum (Kustiningrum et al., 2024). Sehingga bisa disimpulkan bawah arah dari kebijakan ini yaitu memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang asas kesetaraan, kebersamaan dan pentingnya pendidikan bagi semua individu dengan tidak membedakan latar belakang ekonomi, bentuk fisik dan kompetensi kognitif maupun psikomotor.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 sudah gencar mensosialisasikan tentang pendidikan inklusif khususnya untuk jenjang SMA dan SMK umum. Bahkan pada penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 2024-2025 proses dan prosedur untuk PPDB disabilitas diatur dengan jelas 2 % kuota peserta didik disabilitas untuk SMA dan SMK reguler. Harapan besar kepala dinas ditujukan ke semua sekolah jenjang SMA dan SMK yang ada di Kalimantan Barat bisa mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif dengan baik dan dilaksanakan dengan maksimal. Irvan (2019) menyatakan bahwa pendidikan inklusif mendorong integrasi dan partisipasi peserta didik dengan kebutuhan khusus di dalam lingkungan pendidikan reguler. Namun, kenyataan di lapangan dalam praktiknya masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Di jenjang SMA dan SMK reguler implementasi pendidikan inklusif masih belum optimal. Sebagian besar SMA yang selama ini terbiasa dengan pelayanan kepada peserta didik tidak disabilitas sehingga dalam manajemen sekolah kurang menyentuh ke pendidikan inklusif.

SMA Negeri 3 yang ada dalam kota Sanggau merupakan satu diantara sekolah yang diarahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif. Peneliti tertarik meneliti di SMA Negeri 3 Sanggau karena SMA Negeri 3 Sanggau merupakan sekolah binaan peneliti. Kemudian SMA Negeri 3 Sanggau adalah sekolah yang paling banyak peserta didiknya diantara dua SMA Negeri yang ada dalam kota Sanggau. Sebelum gencar kebijakan pendidikan inklusif SMA Negeri 3 Sanggau sudah menerima peserta didik disabilitas. Namun, selama ini ketika

peneliti melaksanakan pendampingan ke sekolah selaku pengawas pembina peneliti mengamati kurang optimalnya implementasi pendidikan inklusif yang berkaitan dengan manajemen sekolah. Manajemen sekolah masih belum siap sepenuhnya melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif. Padahal untuk bisa optimal dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif manajemen sekolah harus dilakukan dengan efektif dan adanya transformasi. Manajemen yang sederhananya disebut juga dengan pengelolaan berperan penting sebagai sarana untuk mencapai visi dan misi sekolah, proses ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi (Yulistiyanto et al., 2021). Dengan demikian adanya transformasi dalam pengelolaan sekolah yang semakin baik dan matang sangatlah penting. Sehingga sekolah bisa merancang program-program yang unggul melalui sumber daya sekolah yang mampu memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya ada beberapa unsur yang terdapat dalam manajemen sekolah yang sangat perlu diperhatikan dalam konteks pendidikan inklusif, adapun unsur tersebut antara lain manajemen kesiswaan, kurikulum dan proses pembelajaran (Armstrong, 2020). Oleh karena itu, manajemen kesiswaan tentunya menjadi landasan utama agar sekolah bisa memastikan bahwa peserta didik disabilitas dan yang tidak disabilitas difasilitasi merata dengan pelayanan yang sesuai dan tepat. Kemudian terkait manajemen kurikulum dan proses pembelajaran yang lebih inklusif akan bisa membantu peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar secara efektif dan efisien dengan pemahaman bersama bahwa peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang beragam. Dalam

operasional satuan pendidikan manajemen sekolah yang dilaksanakan dengan kolaboratif dan efektif akan bisa memberi pembelajaran yang bermakna bagi semua peserta didik. Satuan pendidikan perlu melakukan pembenahan atau transformasi manajemen sekolah agar implementasi pendidikan inklusif berjalan dengan baik. Selanjutnya, manajemen kesiswaan, kurikulum dan proses pembelajaran yang baik bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, serta seluruh peserta didik di satuan pendidikan akan membawa dampak positif dengan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 1) mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif melalui transformasi manajemen kesiswaan meliputi persiapan, rancangan kegiatan dan sistem penerimaan peserta didik disabilitas di SMA Negeri 3 Sanggau 2) mengetahui implementasi kebijakan pendidikan inklusif melalui transformasi manajemen kurikulum terkait pengembangan kurikulum di SMA Negeri 3 Sanggau dan 3) mengetahui implementasi kebijakan pendidikan inklusif melalui transformasi manajemen proses pembelajaran meliputi analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan asesmen pembelajaran di SMA Negeri 3 Sanggau.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian naturalistik, satu diantara metode penelitian kualitatif karena dilakukan dalam keadaan yang alamiah. Menurut Sugiyono (2014) pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan

data yang lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan dokumentasi, observasi, wawancara, dan angket. Pendekatan analisis interaktif oleh Miles dan Huberman digunakan dalam menganalisis data. Adapun tahapan dalam analisis data yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berdasarkan prosedur analisis data Miles dan Huberman yang disebutkan di atas, prosedur analisis data penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Peneliti mencatat semua hal yang terkait dengan temuan fenomena dengan cara didokumentasikan, melaksanakan observasi serta membangun komunikasi dengan mewawancari kepala sekolah, guru serta peserta didik. Berdasarkan kegiatan tersebut maka catatan lapangan dibuat dengan lengkap dan akurat.
2. Peneliti menelaah kembali catatan hasil studi dokumentasi, observasi, dan wawancara sebagai proses dari reduksi data. Selanjutnya data diidentifikasi sebagai data penting atau tidak penting, dan dilakukan reduksi data (data reduction) berdasarkan catatan yang diperoleh pada saat di lokasi penelitian.
3. Data atau data display yang telah diklasifikasikan sesuai fokus dan tujuan penelitian dideskripsikan dengan jelas dan sistematis sebagai upaya menyajikan data dengan baik.
4. Peneliti membuat analisis akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dijadikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini melibatkan pembahasan dan verifikasi. Kesimpulan sementara atau temuan penelitian dihasilkan dari data-data tersebut. Dalam hal ini kesimpulan

tersebut akan terus berkembang seiring dengan penemuan data baru untuk memastikan kesesuaian dengan keadaan yang sebenarnya.

5. Peneliti merumuskan kesimpulan akhir yang bebas dari unsur subyektifitas. Hal ini dilakukan dengan cara data kualitatif yang telah dikumpulkan dengan cara berdiskusi dengan orang lain guna sehingga mengurangi subjektivitasnya (Miles & A.Michael, 2007)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### *Transformasi Manajemen Kesiswaan*

Terdapat transformasi manajemen kesiswaan di SMA Negeri 3 Sanggau terkait dengan kebijakan pendidikan inklusif sesuai mekanisme petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan petunjuk teknis panitia PPDB melakukan persiapan pemahaman alur PPDB disabilitas. Kemudian melaksanakan proses identifikasi dan asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif bagi peserta didik. Pelaksanaan asesmen untuk memetakan kebutuhan belajar dan minat peserta didik merupakan transformasi yang dilakukan manajemen kesiswaan. Selanjutnya dalam pembagian kelas sekolah tidak membedakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus akan tetapi semuanya membaaur bersama sehingga dalam satu kelas peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus dan yang berkebutuhan khusus belajar bersama dalam satu ruang kelas.

#### *Transformasi Manajemen Kurikulum*

Transformasi manajemen kurikulum dilakukan dalam upaya implementasi kebijakan pendidikan inklusif yaitu adanya proses adaptasi kurikulum inklusif dan SMA Negeri 3 memilih model duplikasi

artinya kurikulum yang digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) sama dengan kurikulum yang digunakan peserta didik pada umumnya yang non-PDBK. Pengembangan kurikulum dilakukan menggunakan kurikulum merdeka dengan mengacu pada kurikulum adaptif untuk sekolah inklusif yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat para peserta didik berkebutuhan khusus. Adapun yang kurikulum adaptif untuk sekolah inklusi yang disesuaikan tersebut tahapan langkah pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, konten materi, proses pembelajaran, dan asesmen. Para pendidik bisa menyesuaikan kompetensi yang dicapai agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang diharapkan. Kemudian bisa juga dengan cara mengganti dengan kompetensi lain yang setara serta melakukan penyederhanaan kompetensi yang hendak dicapai. Hasil asesmen diagnostik menjadi dasar para tenaga pendidik melakukan proses penyerhanaan dengan meninjau bagaimana kemampuan awal, kondisi, dan modalitas belajar peserta didik.

#### *Transformasi Manajemen Proses Pembelajaran*

Berdasarkan observasi di kelas dan wawancara dengan guru terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif terdapat transformasi manajemen proses pembelajaran di SMA Negeri 3 Sanggau. Dengan mengacu pada kurikulum merdeka tahapan yang dilakukan dalam manajemen proses yang pertama yaitu guru melakukan analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Asesmen diagnostik, formatif dan sumatif yang meliputi aspek

afektif, kognitif dan psikomotor dilaksanakan dengan menerapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah disesuaikan.

## Pembahasan

### *Tranformasi Manajemen Kesiswaan*

Terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan merata bagi semua peserta didik dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif bisa terwujud dengan adanya tranformasi manajemen kesiswaan yang berperan dengan baik. SMA Negeri 3 Sanggau berupaya melakukan tranformasi manajemen kesiswaan dalam rangka melaksanakan pendidikan inklusif dengan cara memetakan potensi dan mencari tahu tantangan yang dihadapi peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam hal ini SMA Negeri 3 Sanggau juga melibatkan tenaga ahli walaupun bersifat internal seperti guru bimbingan konseling dalam proses identifikasi dan asesmen awal bagi peserta didik.

Hal ini sesuai dengan pendapat (Choliquil Maa'ruf et al., 2023) yang menyatakan bahwa analisis kebutuhan peserta didik dan penggunaan model kelas reguler dengan *pull out* juga menjadi bagian penting dalam manajemen peserta didik di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kondisi ini dilakukan agar bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif yang menyenangkan dan bermakna. Maka perlu dilakukan pembagian kelas menggunakan model kelas reguler dengan *pull out* bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Penerapan sederhana dari model ini yaitu dengan menyiapkan guru pembimbing khusus dan ruang kelas khusus pada waktu tertentu (Wiliyanto, 2022). Hal ini dilakukan untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus dapat segera beradaptasi dan lebih fokus

memperoleh perhatian terkait kebutuhan akademik dan sosialnya. Namun dalam memudahkan sosialisasi di kelas peserta didik berkebutuhan khusus juga bisa ditempatkan duduk bersebelahan dengan peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus, agar bisa membangun integrasi sosial yang lebih baik.

Tranformasi manajemen kesiswaan mengikuti prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai petunjuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Mekanisme PPDB tahun 2024 diatur dengan jelas kuota untuk peserta didik disabilitas. Sehingga sekolah reguler tidak boleh menolak peserta didik disabilitas. Walaupun sesungguhnya SMA Negeri 3 sebelum tahun 2024 sudah pernah menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Sehingga selama ini dengan kondisi satuan pendidikan yang seadanya dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif para tenaga pendidik di SMA Negeri 3 Sanggau sudah terbiasa melayani peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar bergabung dengan anak-anak biasa lainnya. Hanya pelayanan pendidikan inklusif belum optimal. SMA Negeri 3 Sanggau belum bisa melibatkan para tenaga ahli medis seperti dokter, psikolog, dan terapis. Sehingga dalam proses identifikasi dan asesmen awal peserta didik berkebutuhan khusus belumlah maksimal. Hal ini bukan tanpa alasan satuan pendidikan tidak memiliki alokasi dana khusus untuk bekerjasama dengan tenaga ahli kesehatan sedangkan orangtua peserta didik juga kurang peduli. Padahal agar implementasi kebijakan pendidikan inklusif bisa optimal tentunya perlu anggaran khusus, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan masyarakat dan stakholder terakit serta tidak kalah pentingnya kolaborasi semua warga sekolah.

### ***Tranformasi Manajemen Kurikulum***

Di SMA Negeri 3 Sanggau kurikulum satuan pendidikan yaitu kurikulum merdeka dengan model duplikasi artinya kurikulum yang digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) sama dengan kurikulum yang digunakan peserta didik pada umumnya yang non-PDBK (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2011) Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus maka diselaraskan juga dengan kurikulum adaptif untuk sekolah inklusif. Para guru menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi sebagai upaya memfasilitasi beragamnya minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Menurut Annisa Wahid (2015) dalam proses pembelajaran di kelas guru diharapkan menyiapkan media dan metode pembelajaran yang interaktif, sehingga peserta didik menjadi aktif, responsif dan suasana belajarpun terlihat bermakna dan bahagia. Tranformasi manajemen kurikulum pada tahapan asesmen mencakup asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Dalam proses pelaksanaan asesmen dan penetapan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tetap mempertimbangkan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus.

### ***Tranformasi Manajemen Proses Pembelajaran***

Tranformasi manajemen proses pembelajaran di SMA Negeri 3 Sanggau meliputi 1) penyusunan perangkat pembelajaran yaitu analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, 2) pelaksanaan pembelajaran dan 3) asesmen. Pada tahap penyusunan perangkat pembelajaran guru melakukan analisis capaian pembelajaran sehingga dalam skenario pembelajaran di kelas akan sinkron dengan tujuan

pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya guru menyusun dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik (LKPD).

Dalam kegiatan pembelajaran di kelas berjalan dengan baik dan interaktif antara guru dan peserta didik. Guru sudah berusaha maksimal dalam menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Sebagian guru sudah mencoba pembelajaran berdiferensiasi dan menyiapkan media yang bisa membuat peserta didik berkebutuhan khusus terlibat aktif sama dengan peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus. Guru sudah bisa memposisikan dirinya sebagai fasilitator yang merangkul anak berkebutuhan khusus bisa belajar bersama di kelas reguler. Hal ini bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan bersahabat bagi semua peserta didik. Sejalan dengan pendapat (Garnida, 2015) yang menyatakan bahwa peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusif adalah sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan merata bagi semua peserta didik.

Asesmen yang dilakukan guru berupa asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Asesmen meliputi aspek afektif, kognitif dan psikomotor dengan kriteria ketercapaian pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif.

### **KESIMPULAN**

Tranformasi manajemen kesiswaan di SMA Negeri 3 Sanggau dimulai dari pembentukan panitia PPDB yang diwajibkan memahami prosedur penerimaan peserta didik disabilitas kemudian persiapan panitia PPDB pada saat penerimaan peserta didik baru dengan melaksakan analisis kebutuhan peserta

didik, identifikasi dan asesmen diagnostik terhadap peserta didik disabilitas Mekanisme PPDB dilaksanakan sesuai petunjuk teknis prosedur PPDB peserta didik disabilitas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024.

Tranformasi manajemen kurikulum di SMA Negeri 3 Sanggau kurikulum yang digunakan didasarkan pada kurikulum merdeka dengan model duplikasi artinya kurikulum yang digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) sama dengan kurikulum yang digunakan peserta didik pada umumnya yang non-PDBK. Pelaksanaan kurikulum inklusif oleh para guru menggunakan pendekatan diferensiasi sebagai upaya memfasilitasi beragamnya kemampuan dan kebutuhan peserta didik dalam satu kelas. Metode pembelajaran juga disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan, menarik dan bermakna

Tranformasi manajemen proses pembelajaran di SMA Negeri 3 Sanggau meliputi 1) penyusunan perangkat pembelajaran yaitu analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, 2) pelaksanaan pembelajaran dan 3) asesmen

Jadi implementasi kebijakan pendidikan inklusif sudah diupayakan dengan adanya tranformasi manajemen sekolah terutama di komponen manajemen kesiswaan, kurikulum dan proses. Namun masih perlu dukungan dari semua pihak seperti tenaga ahli medis, orangtua dan stakholder terkait sehingga SMA Negeri 3 bisa melaksanakan pendidikan inklusif lebih optimal. Agar ke depannya SMA Negeri 3 bisa menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang unggul maka peneliti memberi saran yang

ditujukan kepada kepala sekolah dan pendidik. Adapun saran untuk kepala sekolah diharapkan 1) kepala sekolah semakin giat dan bersemangat dalam menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan tenaga ahli seperti psikolog atau dokter. 2) Kepala sekolah selalu rutin membangun komunikasi yang intensif kepada semua warga sekolah terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif agar suasana satuan pendidikan terjalin nyaman bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 3) Kepala sekolah bisa mengupayakan ada program studi tiru ke sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang sudah unggul untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan kinerja dalam implementasi pendidikan inklusif. Kemudian saran untuk pendidik diharapkan melibatkan peserta didik berkebutuhan khusus aktif dalam pembelajaran di kelas reguler dan pendidik mau selalu mengupdate pengetahuan tentang pendidikan inklusif agar implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 3 Sanggau ke depannya akan berjalan dengan lebih baik dan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Wahid. (2015). *PENDIDIKAN INKLUSIF (Mewujudkan Keadilan, Kesetaraan Dalam Lingkungan Multikultural)*.
- Armstrong, D. (2020). *Inclusive education in practice: An Australian perspective*. Routledge.
- Choliquil Maa'ruf, A., Budiyanto, B., & Andajani, S. J. (2023). Implementasi Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Bontang. *GRAB KIDS: Journal of Special Education Need*, 3(1), 53–58. <https://doi.org/10.26740/gkjsen.v3i1.21855>

- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2011). Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif. *Departement Pendidikan Nasional*, 70, 1–36.
- Garnida, D. (2015). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Refika Aditama.
- Irvan, M. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan Di Indonesia. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 15(27), 67–78. <https://doi.org/10.36456/bp.vol15.no27.a1790>
- Julia, M., Rabiah, S., Marhadi, H., & Riau, U. (2024). *Studi Literatur: Implementasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Di Provinsi Riau Rahmat Rael Mukrom*. 2(2), 199–211. <https://doi.org>
- Kustawan, D. (2013). *Manajemen Pendidikan Inklusif, Kiat Sukses Mengelola Pendidikan Inklusif di Sekolah Umum dan Kejuruan*. Univ.Indonesia Press.
- Kustiningrum, B., Arisyahidin, A., & Askafi, E. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Blitar. *Journal of Education Research*, 5(2), 1798–1810. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.988>
- Miles, M. B., & A. Michael, H. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Univ.Indonesia Press.
- Sakinah, S. F., & Andry, H. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tingkat Sekolah Dasar Penggerak Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 628–650. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/17705>
- Sudarto, Z. (2017). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 1(1), 97. <https://doi.org/10.26740/jp.v1n1.p97-106>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Vađurová, H., & Pančocha, K. (2023). Inclusive education in the Czech Republic: A scoping review of a paradigm shift. *European Journal of Education*, 58(2), 245–266. <https://doi.org/10.1111/ejed.12558>
- Wiliyanto, N. R. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di SMAN 1 Padangan. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 144–152. <https://doi.org/10.55352/mudir.v4i1.490>
- Yulistiyo, D., Fahmid, S., & Renna. (2021). Mengoptimalkan Manajemen Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas*, 21(2), 80–85.